



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Rizki Nurdiansyah¹, Mugni Mugni², Melly Rifa'atul Lailiyah³

¹⁻³Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111, Indonesia

Korespondensi penulis: rizkinurdiansyah21@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to find out the effectiveness of law enforcement against online gambling crimes, considering that eradicating online gambling is quite complicated because it is technology-based. Often, efforts to eradicate it have often been carried out, such as blocking online gambling sites. However, in reality this is still not optimal because until now online gambling can still be accessed. The research method used in this research is the normative juridical research method, which is a research method that focuses on the analysis of statutory regulations, legal documents and legal concepts related to a legal problem. The approach applied in this research is a conceptual approach, a type of approach that emphasizes the analytical perspective of problem solving. This approach involves understanding aspects of legal concepts that are the basis or background of the problem, and also considering the values contained in the norming of a regulation, related to the concepts used. In this research, an effort was found that can be made in terms of the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online gambling, namely through: 1. Legal Regulation; 2. Law Enforcement; 3. International Cooperation; 4. Technology; 5. Prevention and Education; 6. Efficient Courts; and 7. Community Support. Overall, the effectiveness of law enforcement against online gambling crimes involves a series of strategies that include at least the seven points above (Legal Regulation, Law Enforcement, International Cooperation, Technology, Prevention and Education, Efficient Courts, and Community Support). Successful law enforcement efforts require a holistic approach that integrates these various elements to address the complex challenges that arise in the digital environment.*

Keywords: *Effectiveness, Law enforcement, Online Gambling.*

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, mengingat pemberantasan terhadap judi online ini cukup rumit karena berbasis teknologi. Kerap kali dalam upaya pemberantasannya sudah sering dilakukan seperti dengan melakukan pemblokiran terkait situs-situs judi online. Namun dalam kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karena sampai saat ini perjudian online masih bisa dikases. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), suatu jenis pendekatan yang menekankan pada sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan, terkait dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini ditemukan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam hal efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yaitu lewat: 1. *Regulasi Hukum*; 2. *Penegakan Hukum*; 3. *Kerjasama Internasional*; 4. *Teknologi*; 5. *Pencegahan dan Edukasi*; 6. *Pengadilan yang Efisien*; dan 7. *Dukungan Masyarakat*. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup setidaknya tujuh point diatas (*Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan Dukungan Masyarakat*). Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen tersebut untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital.

Kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Judi Online.

1. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah struktur masyarakat dari yang awalnya bersifat lokal menjadi bersifat global. Transformasi ini dipicu oleh keberadaan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang bersatu dengan media elektronik menghasilkan suatu alat baru yang dikenal sebagai internet. Internet membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, menghapuskan batasan jarak dan waktu. Internet menciptakan realitas baru dalam kehidupan sehari-hari dan membuka berbagai peluang baru dalam masyarakat. Namun, sekaligus juga membuka pintu bagi peluang-peluang baru dalam hal kejahatan.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat positif, namun juga memiliki dampak negatif, seperti memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan di dunia maya, yang dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime dapat dijelaskan sebagai kegiatan ilegal yang menggunakan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik global. Perilaku individu yang tidak mematuhi norma yang berlaku dan melanggar kepentingan orang lain atau masyarakat, yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban sosial, dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan formulasi hukum dan sanksi hukum terkait kejahatan menjadi suatu sistem yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kriminal. Disamping itu, produk-produk hukum penyelenggara negara seyogyanya harus mencerminkan produk hukum yang responsif, demokratis, sebagai pemenuhan atas aspirasi suatu kelompok atau individu dalam masyarakat. Dalam penerapan sanksi pidana, terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan, dan di antara berbagai teori tersebut, teori prevensi atau deterrence dianggap sebagai yang paling sesuai untuk mencapai tujuan nasional. Dasar pemikiran dari teori ini adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat sering kali melanggar aturan hukum, termasuk dalam konteks perjudian yang kerap dijumpai. Secara mendasar, perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Perjudian telah menjadi permasalahan yang sangat penting dan mendapat perhatian di semua tingkatan masyarakat Indonesia. Praktik judi online dapat mengancam keamanan dan kenyamanan, serta menciptakan banyak individu yang menghadapi masalah. Penyebaran

keberadaannya telah mencapai berbagai lapisan masyarakat, menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasannya. Kejahatan ini sulit untuk diprediksi di dalam masyarakat, terutama karena karakteristiknya yang bersifat lebih pribadi dan rahasia, yang pada gilirannya memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kondisi kemiskinan yang nyata di Indonesia, faktor ini turut berkontribusi pada meningkatnya prevalensi perjudian, yang kini tidak hanya terbatas pada lapisan masyarakat tertentu. Perjudian memiliki dampak negatif yang merugikan moral dan kesejahteraan mental masyarakat, khususnya generasi muda. Sejalan dengan itu, judi menjadi tantangan sosial yang kompleks dan sulit untuk ditangani, dan praktik perjudian ini telah ada sejak awal peradaban manusia.

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, secara optimal, posisi hukum seharusnya diberikan prioritas tertinggi, dan setiap individu dan tindakan harus patuh terhadap ketentuan hukum tanpa pengecualian. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai penertiban masyarakat dan sebagai instrument penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Prinsip negara hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial terkait keberadaannya.

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aturan tertulis yang bersumber dari peninggalan Belanda yaitu *Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsch Indie* atau dalam istilah Indonesia disebut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melanggar norma kesopanan, yang tidak termasuk dalam ranah kesusilaan yang diatur oleh Bab XIV Buku Kedua KUHP. Pelanggaran hukum yang disengaja terkait dengan tindak pidana ini, seperti memberikan kesempatan untuk berjudi atau terlibat dalam kegiatan semacam itu, diatur oleh Pasal 303 KUHP:

“Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.”

Contoh dampak yang dapat timbul dari judi diantaranya kerugian material yang dapat merusak stabilitas ekonomi keluarga, pemborosan waktu yang tidak produktif, kurangnya pengembangan kreativitas pribadi, dan dampak yang paling serius, yaitu gangguan terhadap keamanan masyarakat, merupakan beberapa efek negatif dari perjudian online. Dalam konteks hukum positif diatur secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Kemudian dalam hal menangani tindak pidana perjudian timbul kendala karena sifatnya yang tertutup, memudahkan orang untuk terlibat di dalamnya. Perjudian tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, melainkan juga telah menjadi isu internasional, mengingat setiap negara memiliki kasus perjudian di dalam wilayahnya. Tingkat kejahatan ini terus meningkat setiap harinya, dan bentuknya pun terus mengalami perubahan. Di Indonesia, pelaksanaan perjudian di dunia nyata seringkali sulit dilakukan oleh para pelaku. Namun, di ranah cyber atau dalam sistem elektronik, pelaksanaan tindakan judi menjadi lebih praktis karena banyaknya media perjudian atau situs perjudian yang tersedia dalam lingkungan elektronik. Selain itu, untuk berpartisipasi dalam kegiatan judi tersebut, tidak diperlukan pertemuan fisik di suatu lokasi tertentu; cukup dengan berada di depan laptop atau perangkat gadget, seseorang dapat bermain judi hanya dengan dukungan jaringan internet.

Diperlukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan cyber crime, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang baik dan mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan berkomunitas. Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh peran mereka dalam masyarakat. Jika langkah-langkah tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan sangat serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, terutama dalam memberantas segala bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah larangan terhadap perjudian online di Indonesia. Meskipun demikian, upaya pemberantasan kejahatan judi online saat ini belum mencapai tingkat optimal.

Pertumbuhan dalam domain hukum terutama dalam pengembangan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perkembangan struktural, yaitu pembangunan lembaga-lembaga hukum yang beroperasi dalam suatu mekanisme, melainkan juga melibatkan perkembangan substansial melalui produk-produk yang muncul dari suatu sistem hukum, seperti peraturan hukum pidana, serta aspek kultural, seperti sikap-sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi

implementasi sistem hukum. Selain itu, hukum pidana juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan idealisasi bentuk masyarakat yang diinginkan.

Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, mengingat pemberantasan terhadap judi online ini cukup rumit karena berbasis teknologi. Kerap kali dalam upaya pemberantasannya sudah sering dilakukan seperti dengan melakukan pemblokiran terkait situs-situs judi online. Namun dalam kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karena sampai saat ini perjudian online masih bisa dikases. Artinya, selain upaya dari bidang teknologi informasi dan komunikasi (KOMINFO) perlu juga keefektifan hukum dalam penegakannya. Secara praktiknya pelaksanaan hukum memang sudah dilakukan, namun perlu suatu cara yang efektif dalam pelaksanaannya, agar kasus perjudian online ini bisa diberantas dengan maksimal.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Regulasi dan Kepatuhan Hukum

Teori Regulasi berfokus pada bagaimana regulasi dan hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks judi online, teori ini menyarankan bahwa adanya regulasi yang jelas, komprehensif, dan ketat dapat memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum. Regulasi yang baik dapat mengurangi pelanggaran dengan menetapkan standar yang jelas dan sanksi yang tegas.

Kraakman et al. (2009) dalam "The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach" mengemukakan bahwa regulasi yang komprehensif berperan penting dalam memastikan kepatuhan. Mereka menunjukkan bagaimana pengaturan yang tepat dapat mencegah kejahatan ekonomi.

Dealing with Online Gambling: Global Approaches oleh Calvin Ayre (2017) menunjukkan bahwa regulasi global yang jelas dalam perjudian online berfungsi sebagai alat pencegah dan membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas

Teori Penegakan Hukum mengkaji efektivitas tindakan penegakan hukum dan peran berbagai faktor seperti teknologi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif

memerlukan dukungan dari teknologi yang memadai dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Harris (2015) dalam "Policing and the Internet: An Empirical Study of E-Crime" menyebutkan bahwa penegakan hukum yang berhasil memerlukan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi dan menindak kejahatan online.

3. Teori Kerjasama Internasional

Teori Kerjasama Internasional menyarankan bahwa kejahatan yang bersifat lintas batas memerlukan kerjasama internasional untuk penegakan hukum yang efektif. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, perjanjian ekstradisi, dan standar internasional untuk regulasi.

Stessens (2014) dalam "International Cooperation in Criminal Matters" membahas bagaimana perjanjian internasional dan kerjasama antarnegara berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus kejahatan lintas batas, termasuk judi online.

Interpol (2020) menyampaikan laporan tentang kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan online, yang menunjukkan bagaimana koordinasi antarnegara dapat memperkuat upaya penegakan hukum.

4. Teori Teknologi dalam Penegakan Hukum

Teori Teknologi berfokus pada penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, termasuk alat-alat seperti analisis data, forensik digital, dan blockchain. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mempermudah pelacakan pelaku kejahatan.

Miller & McGloin (2019) dalam "Digital Forensics and Technology in Crime Investigation" menguraikan bagaimana teknologi forensik dan analisis data dapat meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam mendeteksi kejahatan online.

Goodman & Andrew (2017) membahas aplikasi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, yang relevan untuk perjudian online.

5. Teori Pencegahan dan Edukasi

Teori Pencegahan dan Edukasi menekankan pentingnya pendidikan dan pencegahan dalam mengurangi kejahatan. Edukasi masyarakat tentang risiko judi online dan pencegahan dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Griffiths (2011) dalam "Gambling Addiction and Problem Gambling: Prevention and Treatment" menunjukkan bagaimana pendidikan dan kampanye pencegahan dapat mengurangi prevalensi masalah perjudian.

Harrigan & Dixon (2014) mendiskusikan strategi pencegahan perjudian yang efektif dan bagaimana kampanye edukasi dapat membantu dalam mengatasi judi online ilegal.

6. Teori Pengadilan dan Sistem Peradilan

Teori Pengadilan mengkaji bagaimana sistem peradilan yang efisien dan transparan dapat mempengaruhi hasil penegakan hukum. Pengadilan yang khusus menangani kasus judi online dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses hukum.

Harris (2015) dalam "The Role of Specialized Courts in Criminal Justice" membahas bagaimana pengadilan khusus dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

Kleinig (2018) menyebutkan pentingnya teknologi dan pelatihan dalam pengadilan untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum dalam kasus-kasus kompleks seperti judi online.

7. Teori Dukungan Masyarakat

Teori Dukungan Masyarakat mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat penegakan hukum. Dukungan masyarakat melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan partisipasi aktif dapat membantu identifikasi dan penindakan kejahatan.

Tyler (2006) dalam "Why People Obey the Law" menjelaskan bagaimana dukungan masyarakat dan persepsi keadilan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum.

Klerks & Taylor (2020) membahas bagaimana program pemberdayaan masyarakat dapat mendukung upaya penegakan hukum melalui partisipasi aktif dan pelaporan.

Regulasi hukum yang jelas dan komprehensif, ditunjang dengan teknologi dan kerjasama internasional yang baik, akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Pendidikan dan pencegahan masyarakat yang efektif, serta sistem peradilan yang efisien, akan memperkuat upaya penegakan hukum dan mengurangi prevalensi tindak pidana judi online.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan solusi atau rekomendasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), suatu jenis pendekatan yang menekankan pada sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan, terkait dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk data sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, seperti melakukan analisis melalui buku, jurnal, skripsi, artikel dan internet.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen, yaitu suatu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk regulasi hukum, penegakan hukum, teknologi, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, setidaknya ada tujuh aspek yang dapat dilakukan terhadap keefektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, diantaranya lewat cara sebagai berikut:

1. Regulasi Hukum

Keberadaan undang-undang yang jelas dan komprehensif tentang perjudian online dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum. Regulasi yang kurang jelas atau tidak memadai dapat membuat sulit untuk menghukum pelaku tindak pidana judi online.

Dari perspektif hukum positif, isi pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu: *“Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.”*

Kemudian mengenai judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”* Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No.7 Th 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan pelarangan terhadap pemberian izin perjudian.

Dalam konteks regulasi hukum, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online bisa bergantung pada sejumlah faktor berikut:

- 1) Ketepatan dan Kelayakan Regulasi. Regulasi hukum yang baik harus dirancang dengan cermat untuk mencakup berbagai aspek judi online, termasuk definisi kegiatan judi online, jenis permainan yang diperbolehkan atau dilarang, serta persyaratan lisensi. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan.

- 2) Kesesuaian dengan Teknologi. Karena judi online berkembang bersama dengan perkembangan teknologi, regulasi hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Keterlibatan teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan dalam judi online memerlukan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika tersebut.
- 3) Ketegasan Sanksi dan Hukuman. Regulasi hukum yang efektif harus menetapkan sanksi dan hukuman yang memadai dan efektif sebagai bentuk deterrence. Ancaman hukuman yang serius dapat mengurangi motivasi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan judi ilegal.
- 4) Lisensi dan Pengawasan Operator. Mekanisme pemberian lisensi kepada operator judi online harus ketat dan melibatkan proses yang cermat. Selain itu, pengawasan terhadap operator yang sudah mendapatkan lisensi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan konsumen.
- 5) Kerjasama Antarinstansi. Pentingnya kerjasama antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan regulasi tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas regulasi dapat meningkatkan efisiensi penegakan dan memperkuat kendali terhadap kegiatan judi ilegal.
- 6) Perlindungan Konsumen. Regulasi harus memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang terlibat dalam judi online, termasuk dalam hal keamanan data pribadi, keadilan permainan, dan penanganan keluhan. Pemberian wewenang kepada ombudsman atau badan perlindungan konsumen juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 7) Kemampuan Responsif Terhadap Perubahan. Regulasi harus dirancang dengan kemampuan untuk merespons cepat terhadap perkembangan baru dalam industri judi online. Mekanisme perubahan aturan dan adaptasi terhadap tren baru menjadi penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas regulasi.
- 8) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Tingkat transparansi dalam proses regulasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung penegakan hukum. Masyarakat perlu memahami dasar hukum dan tujuan regulasi untuk mendukung upaya penegakan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dalam pengembangan regulasi hukum, penegakan terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan digital. Regulasi yang baik akan memberikan dasar yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka dengan efisien dan efektif.

2. Penegakan Hukum

Ketersediaan sumber daya, termasuk personel dan teknologi, dapat memengaruhi kemampuan pihak penegak hukum untuk melacak dan menindak pelaku judi online. Kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum. Agar penegakan hukum menjadi lebih efektif, perlu dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum terkait judi online bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi tersebut harus dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis-jenis pelanggaran yang terkait dengan judi online, memberikan wewenang yang cukup kepada aparat penegak hukum, dan menetapkan hukuman yang sesuai. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan teknologi dan keahlian investigasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi serta melacak kegiatan judi online ilegal. Kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti informasi terkait aktivitas ilegal menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan entitas terkait lainnya menjadi faktor kritis. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses investigasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Efektivitas penegakan hukum dapat diperkuat dengan penerapan hukuman yang cukup keras sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan judi online. Ancaman hukuman yang signifikan dapat menjadi faktor penghambat untuk mencegah orang-orang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan judi online menjadi esensial. Keterampilan dalam memahami teknologi, analisis data, dan keahlian investigasi digital akan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren judi online. Fleksibilitas regulasi dan kemampuan penegakan hukum untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan ini akan memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Kesadaran masyarakat terhadap risiko judi

online ilegal dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Pendidikan masyarakat, melalui kampanye penyuluhan dan informasi, dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan publik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang dalam ranah hukum.

3. Kerjasama Internasional

Karena sifat lintas batas internet, kerjasama antarnegara dapat menjadi kunci untuk mengatasi tindak pidana judi online. Kesepakatan dan pertukaran informasi antarnegara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kegiatan judi online seringkali melibatkan transaksi lintas batas dan operasi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi esensial untuk mengejar dan menindak pelaku kejahatan yang beroperasi di luar batas nasional. Kerjasama internasional memungkinkan pertukaran intelijen dan informasi antara negara-negara yang terlibat. Ini dapat mencakup data mengenai pelaku kejahatan, metode operasi, dan tren terbaru dalam dunia judi online ilegal. Perjanjian ekstradisi dan perjanjian penuntutan bersama menjadi instrumen penting dalam mengejar dan mengadili pelaku kejahatan judi online di luar yurisdiksi. Kerjasama ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum. Pengembangan standar internasional terkait dengan regulasi dan penegakan hukum judi online dapat membantu menciptakan kerangka kerja bersama. Adopsi standar ini oleh banyak negara dapat meningkatkan koherensi dan efektivitas upaya penegakan hukum global.

Forum internasional seperti Interpol atau Europol dapat menjadi platform untuk koordinasi antarnegara dalam menangani kejahatan judi online. Pertemuan rutin, konferensi, dan aktivitas bersama dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik. Kerjasama internasional membantu memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di berbagai negara. Ini dapat mencegah pelaku kejahatan untuk mencari tempat perlindungan atau melakukan kegiatan ilegal di wilayah yang kurang diawasi. Pembentukan atau pemberdayaan lembaga atau otoritas regulatif global yang memiliki mandat untuk menangani kejahatan judi online dapat memperkuat kerjasama internasional. Otoritas semacam itu dapat mengoordinasikan upaya antarnegara dan menegakkan standar global.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dari berbagai negara dalam menyelidiki dan menangani kasus pidana internasional. Tim investigasi gabungan dengan keahlian lintas-batas dapat menjadi solusi efektif.

Dengan menjadikan kerjasama internasional sebagai pilar utama dalam strategi penegakan hukum terhadap judi online, negara-negara dapat lebih efektif dalam menangani sifat transnasional dari kejahatan ini. Kolaborasi ini membuka jalan untuk pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan upaya bersama dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan adil secara global.

4. Teknologi

Kemajuan teknologi dapat memudahkan penegakan hukum dalam melacak dan menyusutkan pelaku kejahatan online. Namun, pelaku kejahatan juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan jejak mereka, sehingga pihak penegak hukum perlu terus berkembang dalam hal teknologi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam hal teknologi, maka dipandang perlu untuk:

1) Analisis Data dan Intelijen Buatan

Pemanfaatan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku pelaku kejahatan judi online. Dengan menganalisis data transaksi, jejak digital, dan pola permainan, keberhasilan dalam merinci praktik-praktik ilegal dapat ditingkatkan.

2) Peningkatan Jejak Digital dan Forensik Digital

Peningkatan keterampilan dalam forensik digital dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti elektronik yang kuat. Dengan merinci aktivitas online, termasuk transaksi keuangan dan komunikasi digital, jejak digital ini dapat digunakan dalam pengadilan untuk mendukung kasus hukum.

3) Penggunaan Blockchain

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam industri judi online. Menerapkan sistem yang berbasis blockchain dapat membantu

dalam memverifikasi integritas permainan, mengamankan transaksi keuangan, dan melacak riwayat taruhan dengan lebih akurat.

4) Pengembangan Algoritma Identifikasi Pelanggaran

Pengembangan algoritma cerdas untuk mendeteksi perilaku pelanggaran hukum dalam judi online dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi potensi aktivitas ilegal secara lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat mencakup deteksi kecurangan, pemalsuan identitas, atau praktik-praktik manipulatif lainnya.

5) Pemanfaatan Platform Pelaporan Online

Pemanfaatan platform pelaporan online yang mudah diakses dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan judi online ilegal. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa risiko keamanan bagi para pelapor.

6) Pelatihan Tenaga Ahli Teknologi

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menggunakan teknologi menjadi hal krusial. Melalui pelatihan dan pengembangan keahlian teknologi, mereka dapat lebih efektif dalam melibatkan dan menindak pelaku kejahatan di ranah online.

Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi penegakan hukum, negara dapat lebih adaptif terhadap lingkungan digital yang terus berkembang dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak pidana judi online.

5. Pencegahan dan Edukasi

Upaya pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang yang sadar akan konsekuensi hukum dan risiko terkait judi online, semakin sulit bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi orang-orang.

Misalnya dengan melakukan kampanye edukasi yang menyeluruh dan dapat diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif judi online ilegal. Informasi yang tepat dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengidentifikasi praktik ilegal dan mendorong partisipasi mereka dalam upaya pencegahan. Edukasi masyarakat harus mencakup promosi perilaku bertanggung jawab dalam berjudi online. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya mengontrol kegiatan

perjudian, menetapkan batasan, dan mengenali tanda-tanda ketidaksehatan atau ketergantungan.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat memberikan platform yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan judi online kepada generasi muda. Materi edukasi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman sejak dini. Masyarakat modern sangat terhubung dengan media sosial dan platform digital. Pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi pencegahan dan edukasi tentang judi online dapat mencapai audiens yang lebih luas dan terdiversifikasi. Pun juga dalam hal penyedia layanan kesehatan mental perlu diberikan pelatihan untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada individu yang mungkin terkena dampak negatif dari kegiatan judi online. Peningkatan kesadaran di kalangan profesional kesehatan dapat meningkatkan deteksi dini dan intervensi yang efektif.

Kemitraan dengan organisasi nirlaba yang fokus pada masalah perjudian dapat memperkuat upaya edukasi dan pencegahan. Organisasi ini sering memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pencegahan.

Dengan mengimplementasikan strategi pencegahan dan edukasi yang beragam, negara dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab terkait judi online. Pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi dapat membantu mencegah tindakan ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online ilegal.

6. Pengadilan yang Efisien

Sistem peradilan yang efisien dan transparan penting untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana judi online dapat dihukum secara adil dan sesuai dengan hukum.

Mendirikan pengadilan khusus yang fokus menangani kasus judi online dapat meningkatkan efisiensi. Hakim dan staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan hukum judi online dapat mempercepat penanganan kasus-kasus ini.

Pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen kasus digital dan pengadilan online, dapat meningkatkan efisiensi proses pengadilan. Ini mencakup pencatatan dan penjadwalan elektronik, penggunaan e-filing, dan penggunaan video konferensi untuk sidang. Pelatihan terus-menerus bagi hakim dan jaksa mengenai perkembangan terbaru dalam hukum judi online

dan teknologi yang terlibat diperlukan. Hal ini dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Proses pengadilan yang cepat dan transparan dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem. Penyederhanaan prosedur, peningkatan aksesibilitas informasi pengadilan, dan penerapan pengaturan waktu yang ketat dapat mendukung pencapaian tujuan ini. Pembentukan tim khusus atau divisi di dalam pengadilan yang secara khusus menangani kasus-kasus judi online dapat meningkatkan spesialisasi dan penanganan yang lebih efisien.

Pengadilan harus dapat memberlakukan hukuman yang efektif sebagai bentuk deterrence. Hukuman yang tepat akan memberikan sinyal kuat terhadap pelaku kejahatan dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang. Pengadilan perlu bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bukti yang diperlukan dikumpulkan secara efisien dan penuntutan dilakukan dengan tepat. Mempertimbangkan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, dapat membantu mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Melibatkan ahli digital dan ahli forensik dalam persidangan dapat membantu pengadilan memahami bukti-bukti teknis yang mungkin muncul dalam kasus judi online. Keahlian ini dapat membantu hakim membuat keputusan yang lebih tepat dan mendalam.

Dengan mengoptimalkan sistem peradilan untuk menangani kasus judi online, negara dapat memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efisien, adil, dan efektif dalam menanggapi tantangan kompleks yang muncul dalam era digital ini.

7. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum juga dapat memainkan peran penting. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan.

Dukungan masyarakat dapat dimobilisasi melalui program-program pemberdayaan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu dan kelompok masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu masyarakat untuk mengenali dan melaporkan aktivitas judi online ilegal. Program edukasi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam point 5 yang melibatkan masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko

dan konsekuensi judi online ilegal. Sosialisasi, seminar, dan lokakarya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari kegiatan ilegal ini.

Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan kampanye kesadaran terkait judi online ilegal. Komunitas online dapat berperan sebagai agen penyebaran informasi yang kuat, membantu menyadarkan dan melibatkan lebih banyak orang. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada individu atau keluarga yang menjadi korban dari kegiatan judi online ilegal. Pusat dukungan atau layanan kesehatan mental dapat mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan yang diperlukan. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif lokal untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Kegiatan seperti patroli warga, kegiatan sosial bersama, atau pengembangan program perlindungan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar. Dukungan dan komitmen dari pemimpin masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal lainnya, dapat menjadi kunci dalam menggerakkan masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Organisasi nirlaba yang fokus pada pencegahan judi online ilegal dapat berperan dalam menggalang dukungan masyarakat. Mereka dapat menyelenggarakan kampanye, memberikan pendidikan, dan menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Mendapatkan dukungan dari sektor bisnis dan industri lokal dapat memperkuat upaya pencegahan. Keterlibatan perusahaan dan asosiasi bisnis dalam mendukung kampanye kesadaran atau menyediakan sumber daya untuk inisiatif pencegahan dapat meningkatkan efektivitasnya. Masyarakat perlu didorong untuk aktif melaporkan kegiatan judi online ilegal. Sistem pelaporan yang mudah diakses dan jelas dapat memberikan insentif kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.

Dengan memobilisasi dukungan masyarakat, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung penegakan hukum yang berhasil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan

Dukungan Masyarakat. Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital.

Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat, sementara adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren judi online menjadi kunci dalam menjaga relevansi regulasi. Kerjasama internasional menjadi esensial mengingat sifat transnasional dari kegiatan judi online, dan penggunaan teknologi menjadi alat yang vital dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus. Pencegahan perlu menjadi fokus utama, dengan edukasi masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai bagian dari strategi holistik. Dukungan masyarakat melalui kesadaran, pelaporan, dan partisipasi dalam program pencegahan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kegiatan judi online ilegal.

Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online.

Dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, maka kita harus memahami dengan baik regulasi terkait judi online di wilayah kita. Mengetahui aturan-aturan tersebut dapat membantu pencegahan maraknya judi online. Kemudian jika kita mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas judi online ilegal, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pemberian informasi yang akurat dapat mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan.

DAFTAR REFERENSI

Penegakan Hukum di Indonesia. (2016). Sinar Grafika.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pustaka Belajar.

Solikin, N. (2019). Hukum, masyarakat dan penegakan hukum. Qiara Media.

Radjab, S. (2013). Konfigurasi politik dan penegakan hukum di Indonesia. Nagamedia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Tiyarto, S. (2006). Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian [Tesis, Universitas Diponegoro].

Arisetyanto, W. A. (2023). Upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi online [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].

Marheni, I. (2017). Efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan) [Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta].

Nurdin, R. K. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakan [Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Soraya, A. (2023). Penegakan hukum judi online chip domino yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah ditinjau dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*.

Marrismawati, C. S., Suherman, H., & Ramadhani, D. W. (2024). Mengungkap jaringan dan taktik baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam memerangi kejahatan perjudian online. *Jurnal Litigasi Amsir*.

Siregar, D. (2023). Hukum transaksi dan informasi elektronik berhubungan dengan hukum pelanggaran perjudian online. *Jurnal Hukum Positum*.

Safitri, D. E. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di Kota Makassar. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*.

Hatimatunnisani, H., et al. (2023). Maraknya judi online dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa. *Jurnal Sosio dan Humaniora*.

Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Mahesa Research Center.

Karli, et al. (2023). Penyuluhan pengabdian hukum dalam mengatasi dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan buruh. *Jurnal Publikasi Kegiatan Abdimas*.

Ardiansyah, M. R., et al. (2023). Efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online. *Jurnal Juridisch, Magister Hukum Universitas Semarang*.

Maskun, et al. (2013). Kedudukan hukum cyber crime dalam perkembangan hukum internasional kontemporer. *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

- Kurniawan, M. Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area*.
- Permana, P. T., Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. E. (2016). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali).
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the effectiveness of restorative justice practice in criminal law system. *West Science Law and Human Rights*, 1(3), 107-114.
- Kusumaningsih, R. (2023). Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (ADMA)*.
- Qamar, S. (2018). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik di wilayah Kota Banda Aceh [Tesis, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala].
- Saputra, M. Y. V., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan tindak pidana perjudian online. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(1), 20-30.
- Susdarwono, E. T., & Anis, A. (2024). Defense policy in the link between national policy and national interest. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 3(1), 1-10.
- Hasan, Z., et al. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*.